

Ketergantungan Negara Berkembang dalam Tata Kelola Global: Studi Komparatif antara Filipina dan Vietnam terhadap Bantuan Internasional

Muhammad Fadhillah¹, Damara Khadafi², Alpito Fitranov³, Jimmy Alamsyah Pubian⁴

2316041005¹, 2316041021², 2316041035³, 2356041005⁴

Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Lampung, Lampung, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini membahas bagaimana bantuan internasional berperan dalam membentuk tingkat ketergantungan negara berkembang dalam tata kelola global, dengan mengambil studi komparatif antara Filipina dan Vietnam. Arus globalisasi membuat peran lembaga internasional seperti IMF, World Bank, dan ADB tidak hanya sebatas pemberi bantuan, tetapi juga turut memengaruhi arah kebijakan domestik negara penerima. Hal ini memunculkan perdebatan mengenai apakah bantuan internasional benar-benar mendorong pembangunan atau justru memperkuat ketergantungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis komparatif, serta didukung oleh kerangka teori dependensi dan global governance. Hasil analisis menunjukkan bahwa Filipina cenderung mengalami ketergantungan yang lebih tinggi akibat kuatnya intervensi eksternal dan lemahnya kapasitas institusi dalam mengelola bantuan. Sementara, Vietnam mampu memanfaatkan bantuan internasional secara lebih selektif melalui penguatan peran negara dan strategi pembangunan yang terarah, sehingga ketergantungan dapat ditekan secara bertahap. Temuan ini menegaskan bahwa dampak bantuan internasional tidak bersifat tunggal, melainkan sangat ditentukan oleh kapasitas negara, strategi kebijakan, serta kemampuan dalam menjaga otonomi domestik. Dengan demikian, bantuan internasional dapat menjadi peluang maupun risiko, tergantung pada bagaimana negara mengelolanya dalam konteks tata kelola global.

Kata Kunci: Bantuan Internasional, Ketergantungan, Global Governance, Teori Dependensi, Filipina, Vietnam

I. PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi sekarang ini telah mengubah tata kelola dunia yang tidak hanya bergantung pada negara sebagai aktor utama melainkan ada campur tangan dari lembaga internasional. Kalau dulu negara dianggap sebagai aktor utama, sekarang tidak bisa lagi dilihat sesederhana itu. Banyak lembaga internasional yang ikut berperan terutama dalam urusan ekonomi, seperti International Monetary Fund (IMF), World Bank, dan Asian Development Bank (ADP) (Woods, 2006). Lembaga-lembaga memiliki pengaruh yang cukup besar terutama ke negara berkembang melalui bantuan dana atau pinjaman luar negeri (W. Bank, 2022). Akhirnya, kebijakan ekonomi di banyak negara tidak lagi murni hasil keputusan dalam negeri, tapi juga dipengaruhi oleh kepentingan dan aturan dari aktor global.

Jika kita lihat lebih jauh bantuan internasional biasanya tidak datang dengan Cuma-cuma melainkan memiliki maksud didalamnya. Negara penerima sering harus mengikuti beberapa ketentuan tertentu, seperti membuka pasar (liberalisasi), melakukan privatisasi, atau mengurangi campur tangan negara dalam ekonomi (Fund, 2021). Menurut (Todaro & Smith, 2015) Hal ini yang menjadi perdebatan mengenai efektivitas bantuan internasional dalam mendorong pembangunan ekonomi, contohnya ada yang melihat bantuan ini sebagai peluang untuk mempercepat pembangunan, tapi ada juga yang menganggap justru membuat negara jadi ketergantungan dalam jangka panjang. Jadi, efeknya memang tidak selalu positif atau negatif secara mutlak, tapi tergantung bagaimana cara negara tersebut mengelolanya.

Dikarenakan negara berkembang memang punya banyak keterbatasan, seperti dari segi ekonomi, teknologi, maupun kelembagaan. Kondisi ini yang membuat mereka sering tidak punya banyak pilihan selain menerima bantuan luar negeri untuk mendukung pembangunan (Development, 2020). Tapi, dari perspektif teori ketergantungan muncul masalah lain yaitu hubungan yang jadi tidak seimbang antara negara penerima dan pemberi bantuan (Dos Santos, 1970). Ketergantungan ini bisa dibilang bersifat struktural, karena terus berulang dan sulit dilepaskan serta tata kelola global (global governance) tidak selalu berjalan netral, tapi bisa menciptakan hubungan kekuasaan yang timpang. Jika kita lihat dari kerangka sistem dunia, negara berkembang cenderung berada pada posisi periferi yang bergantung pada negara inti dalam sistem ekonomi global (Wallerstein, 2004).

Paper ini mengambil contoh dua negara yaitu Filipina dan Vietnam menjadi dua studi kasus yang menarik untuk dibandingkan dalam melihat dampak bantuan internasional. Filipina cenderung menerapkan kebijakan ekonomi pasar yang banyak dipengaruhi oleh

rekomendasi lembaga donor internasional, sehingga berdampak pada tingginya ketergantungan terhadap utang dan bantuan luar negeri (A. D. Bank, 2021). Sebaliknya, Vietnam sejak reformasi ekonomi *Đổi Mới* mampu memanfaatkan bantuan secara lebih selektif dengan tetap mempertahankan peran negara dalam mengendalikan pembangunan (W. Bank, 2022). Perbedaan pendekatan ini menunjukkan bahwa dampak bantuan internasional tidak bersifat seragam, melainkan sangat ditentukan oleh strategi dan kebijakan domestik masing-masing negara.

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Tata Kelola Global (Global Governance)

Tata Kelola Global terdiri dari dua kata yang berbeda, yakni *'tata kelola'* (governance) dan *'global'* yang memiliki ragam dan sarat makna serta digunakan bersama satu sama lain. Istilah *'tata kelola'* berkenaan dengan mekanisme atau cara membuat, mengemudikan, mengarahkan, dan mengatur dalam kebijakan dan tindakan masyarakat atau global (Jentleson, 2017). Sementara *'global'* merujuk kepada keseluruhan jaringan sistem internasional, transnasional dan multilateralisme yang mencakup kebutuhan besar akan kerja sama untuk mengatasi permasalahan, terutama perdamaian dan keamanan, pembangunan, hak asasi manusia, lingkungan, dan kesehatan (Dingwerth & Pattberg, 2006).

Hal ini sejalan dengan Global Challenges Foundation yang mendefinisikan Global Governance sebagai sistem institusi, aturan, norma, dan prosedur yang memungkinkan kerja sama internasional dalam isu-isu yang melintasi batas negara dengan tujuan untuk menemukan dan mengelola solusi kolektif terhadap tantangan global. Namun, dalam praktiknya organisasi seperti United Nations (UN), International Monetary Fund (IMF), dan World Bank punya peran yang cukup besar terutama dalam urusan ekonomi dan pembangunan (Woods, 2006). Peran mereka bukan cuman sebatas memberi bantuan atau pinjaman, tapi juga ikut membentuk regulasi mulai dari penetapan norma, sampai rekomendasi kebijakan yang *'sebaiknya'* diikuti oleh negara berkembang. Dampaknya, ruang gerak kebijakan dalam negeri tidak bisa seleluasa biasanya karena harus menyesuaikan standar dari aktor global tersebut.

Tata kelola global juga menunjukkan bahwa antarnegara sekarang saling bergantung satu sama lain, terutama dalam menghadapi masalah besar seperti masalah kemiskinan, ketimpangan, dan krisis ekonomi. Tapi kenyataannya hubungan ini nggak

selalu berjalan seimbang dikarenakan negara maju biasanya punya posisi tawar yang lebih kuat dari segi ekonomi maupun politik, sehingga lebih berpengaruh dalam menentukan arah kebijakan global. Sementara itu, negara berkembang sering berada di posisi yang harus menyesuaikan. Itu yang menyebabkan tidak sedikit yang mengkritik konsep global governance ini, karena dianggap bisa memperkuat dominasi negara maju dibandingkan benar-benar menciptakan kerja sama yang setara.

B. Bantuan Internasional: Pembangunan atau Hegemoni

Bantuan internasional menjadi salah satu sumber penting buat negara berkembang dalam menjalankan pembangunan, apalagi di sektor-sektor yang butuh biaya besar seperti infrastruktur, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan. Data dari Organisation for Economic Co-operation and Development juga menunjukkan kalau aliran *Official Development Assistance* (ODA) punya kontribusi yang cukup signifikan dalam pembiayaan pembangunan kepada negara berkembang yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan ekonomi (Development, 2020).

Jika kita lihat dari perspektif pembangunan (*developmentalist perspective*) berpandangan bantuan internasional bisa membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat (Todaro & Smith, 2015). Ini sejalan dengan teori modernisasi (Walt W. Rostow) yang berpendapat bahwa negara berkembang bisa '*mengejar ketertinggalan*' melalui transfer modal, teknologi, dan pengetahuan dari negara maju. Jadi, wajar bila banyak negara melihat bantuan internasional sebagai salah satu solusi untuk menutupi keterbatasan sumber daya di dalam negeri.

Namun, perspektif kritis melihat bantuan internasional tidak selalu dianggap netral. Bantuan internasional kerap menjadi instrumen tujuan pembangunan yang kadang membawa agenda hegemoni yang digunakan negara pendonor untuk menaruh pengaruh politik dan ekonomi kepada negara penerima. Antonio Gramsci menjelaskan konsep hegemoni sebagai dominasi yang tidak hanya bersifat koersif, tetapi juga melalui persetujuan (*consent*) karena dalam bantuan internasional tersebut, negara donor dapat mempengaruhi kebijakan domestik negara penerima melalui syarat-syarat bantuan (*conditionalities*) seperti liberalisasi perdagangan, privatisasi, dan deregulasi ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa bantuan internasional memiliki sifat

ambivalen, di satu sisi memberikan manfaat pembangunan, namun di sisi lain berpotensi menciptakan ketergantungan struktural.

C. Teori Dependensi (Dependency Theory)

Teori dependensi lahir dari kritik terhadap teori modernisasi yang dianggap terlalu optimistis pada peran bantuan internasional dan kapitalisme global. Tokoh utama yang mengembangkan teori ini adalah Theotonio Dos Santos yang menjelaskan kenapa hubungan antara negara maju (core) dan negara berkembang (periphery) sering tidak seimbang dalam sistem ekonomi global. Menurut (Dos Santos, 1970) dependensi adalah suatu kondisi di mana ekonomi negara berkembang bergantung pada perkembangan dan ekspansi ekonomi negara maju.

Dalam praktiknya negara maju yang bersifat eksploitatif. Negara berkembang umumnya mengekspor sumber daya alam dalam bentuk barang mentah dengan harga relatif murah. Sementara itu, negara maju yang mempunyai teknologi dan sumber daya manusia yang lebih unggul memanfaatkan hal itu untuk mengubah barang mentah menjadi produk jadi dengan nilai jual yang jauh lebih tinggi. Akibatnya keuntungan terbesar lebih banyak dinikmati oleh negara maju dalam sistem ekonomi global. Pola hubungan seperti ini memperlihatkan adanya ketimpangan yang bersifat struktural, di mana negara berkembang cenderung tetap berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan negara maju.

Hal itu sejalan dengan Immanuel Wallerstein lewat teori sistem dunia membagi struktur ekonomi global ke dalam tiga kategori utama, yaitu core, semi-periphery, dan periphery (Wallerstein, 2004). Negara-negara core merupakan negara maju yang menguasai teknologi, modal, dan perdagangan global, sedangkan negara periphery adalah negara berkembang yang bergantung pada ekspor bahan mentah dan bantuan luar negeri, sementara semi-periphery berada di antara keduanya dengan tingkat ketergantungan yang lebih moderat. Pembagian ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi global telah terstruktur sedemikian rupa sehingga menciptakan ketimpangan antarnegara.

Namun dalam faktanya negara berkembang umumnya berada pada posisi periphery yang memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi pada negara maju. Bantuan dan utang luar negeri yang kerap memperkuat ketergantungan tersebut karena menambah beban ekonomi sekaligus membatasi ruang gerak kebijakan domestik negara penerima. Meskipun begitu tingkat ketergantungan setiap negara tidak bersifat

mutlak melainkan memiliki perbedaan, ini tergantung bagaimana kebijakan dalam negeri masing-masing negara. Negara yang bisa secara selektif mengelola bantuan dari asing dan memposisikan diri lebih banyak berperan dalam ekonomi cenderung memiliki tingkat ketergantungan yang rendah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Study Case Filipina

Ketergantungan Filipina terhadap bantuan internasional dan utang luar negeri terbentuk melalui proses historis yang cukup panjang setelah kemerdekaan. Ketika Filipina merdeka dari Amerika Serikat Tahun 1946, Filipina sempat mencoba menjalankan kebijakan ekonomi yang relatif mandiri, mereka mulai berubah sejak tahun 1960-an, ketika ada tekanan dari aktor eksternal seperti International Monetary Fund dan pemerintah Amerika Serikat yang mendorong liberalisasi ekonomi.

Perubahan yang paling terasa terjadi pada masa pemerintahan Ferdinand Marcos, terutama pada saat diberlakukannya darurat militer pada tahun 1972. Periode ini, Filipina justru mendapatkan dukungan finansial yang cukup besar dari lembaga internasional seperti World Bank. Antara tahun 1973–1981, jumlah pinjaman dari Bank Dunia meningkat sangat signifikan hingga mencapai lebih dari 2,6 miliar USD. Kondisi ini memang sempat mendorong pembangunan, tapi di sisi lain juga menyebabkan lonjakan utang luar negeri yang cukup besar dan mulai membebani ekonomi domestik (Gloria, 2019).

Akumulasi utang tersebut kemudian berdampak jangka panjang. Menjelang akhir pemerintahan Marcos, total utang luar negeri Filipina meningkat dari sekitar 5 miliar USD menjadi 26 miliar USD. Peningkatan ini tidak diimbangi dengan kondisi ekonomi yang membaik, justru diikuti dengan naiknya tingkat kemiskinan dan melambatnya pertumbuhan ekonomi. Ketika rezim berganti pun pemerintah Filipina tetap berada dalam tekanan lembaga internasional untuk terus membayar utang. Akibatnya, sebagian besar anggaran negara lebih banyak dialokasikan untuk pembayaran utang dibandingkan untuk pembangunan sosial. Kondisi ini pada akhirnya memperkuat ketergantungan ekonomi Filipina terhadap sistem keuangan global.

Struktur bantuan asing di Filipina pada dasarnya didominasi oleh aktor-aktor besar yang punya kepentingan strategis, terutama dalam mendorong kebijakan liberalisasi ekonomi. Amerika Serikat bisa dibilang jadi aktor paling dominan dilihat

dari sejarah maupun pengaruhnya sampai sekarang. Perannya terlihat dari dorongan terhadap kebijakan neoliberal seperti liberalisasi perdagangan, deregulasi, dan privatisasi. Intervensi ini tidak cuma lewat bantuan langsung (bilateral), tapi juga melalui program dari International Monetary Fund dan World Bank yang sering jadi saluran utama kebijakan ekonomi. Bahkan, lembaga seperti United States Agency for International Development juga ikut terlibat dalam proses reformasi ekonomi, termasuk dalam perumusan kebijakan domestik.

Ternyata tidak hanya Amerika Serikat, Jepang juga punya peran penting sebagai donor bilateral utama. Bantuan yang diberikan umumnya dalam bentuk *Official Development Assistance* (ODA), yang banyak difokuskan pada pembangunan infrastruktur dan penguatan kapasitas kelembagaan. Sementara itu, aktor multilateral seperti Bank Dunia dan IMF lebih berperan dalam menentukan kerangka kebijakan lewat mekanisme pinjaman yang disertai syarat tertentu. Jika, dilihat secara keseluruhan, kombinasi antara peran aktor bilateral dan multilateral ini menunjukkan bahwa bantuan internasional di Filipina nggak hanya soal dukungan finansial. Lebih dari itu, bantuan juga menjadi alat untuk memengaruhi arah kebijakan ekonomi secara lebih luas dan sistemik.

Dampak ketergantungan Filipina terhadap bantuan internasional ternyata cukup besar, bukan hanya ke struktur ekonominya, tapi juga ke kedaulatan dalam menentukan kebijakan. Pada periode 1980–1999, Filipina menjalani berbagai program *structural adjustment* yang disyaratkan oleh World Bank dan International Monetary Fund. Program ini mencakup kebijakan seperti liberalisasi tarif, privatisasi, sampai pengurangan belanja negara. Secara teori, kebijakan ini ditujukan untuk memperbaiki efisiensi ekonomi, tapi dalam praktiknya justru membatasi ruang gerak pemerintah dalam menentukan kebijakan domestik. Akibatnya, daya saing sektor industri dalam negeri menurun, sementara sektor pertanian juga melemah karena harus bersaing di pasar yang semakin terbuka (Bello, 2026).

Kebijakan privatisasi dan pengurangan subsidi juga tidak memberikan hasil yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan dari privatisasi lebih banyak dialokasikan untuk membayar utang dibandingkan untuk investasi yang produktif. Hal ini berimplikasi pada kualitas layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan justru mengalami penurunan. Dalam jangka panjang, kondisi ini sering disebut sebagai “*perangkap penyesuaian*” yaitu situasi di mana pertumbuhan ekonomi tetap rendah dan ketergantungan terhadap bantuan luar negeri

terus berlanjut. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan penyesuaian struktural yang seharusnya mendorong kemandirian, dalam kasus Filipina justru cenderung memperkuat ketergantungan (Bello, 2026).

B. Study Case Vietnam

Berbeda dengan Filipina, hubungan Vietnam dengan bantuan internasional punya karakter yang cukup dipengaruhi oleh faktor ideologi dan geopolitik, Setelah reunifikasi pada tahun 1975, Vietnam sangat bergantung pada bantuan dari Uni Soviet sebagai bagian dari Blok Timur. Awal 1980-an, nilai bantuan bahkan mencapai lebih dari 1 miliar USD per tahun dan menjadi sumber utama pembiayaan ekonomi negara. Namun, ketergantungan tersebut justru ikut memicu krisis ekonomi pada pertengahan 1980-an, yang ditandai dengan inflasi tinggi dan stagnasi ekonomi.

Vietnam kemudian merespons dengan melakukan reformasi ekonomi yang dikenal dengan *Đổi Mới* pada tahun 1986. Reformasi ini mengarah pada sistem ekonomi yang lebih terbuka, tapi tetap mempertahankan peran negara dalam mengendalikan arah pembangunan. Sejak saat itu Vietnam mulai membuka diri terhadap bantuan dari negara-negara Barat serta lembaga multilateral seperti World Bank dan Asian Development Bank.

Pada periode 1993–2004, Vietnam menerima komitmen *Official Development Assistance* (ODA) sekitar 29 miliar USD, dengan tingkat pencairan yang relatif tinggi. Namun memiliki perbedaan dengan Filipina, Vietnam cenderung lebih mampu memanfaatkan bantuan tersebut sesuai dengan strategi pembangunan nasional yang sudah dirancang sebelumnya. Artinya, bantuan tetap digunakan, tapi tidak sepenuhnya menentukan arah kebijakan domestik.

Struktur donor di Vietnam bisa dikatakan lebih beragam dibanding beberapa negara berkembang lain. Bantuan yang masuk datang dari kombinasi donor bilateral dan multilateral dengan karakter yang berbeda-beda. Jepang menjadi donor bilateral terbesar, terutama lewat pendanaan proyek infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan jembatan. Bantuan dari Jepang ini umumnya berorientasi jangka panjang dan diarahkan untuk memperkuat kapasitas produksi nasional. Selain itu, lembaga multilateral seperti World Bank dan Asian Development Bank juga punya peran penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan Vietnam (Vietnam, 2018).

Beberapa tahun terakhir, Tiongkok juga mulai muncul sebagai aktor donor yang cukup signifikan, terutama melalui skema pinjaman untuk proyek infrastruktur.

Walaupun begitu, Vietnam cenderung berhati-hati dalam menerima bantuan dari Tiongkok, terutama karena mempertimbangkan faktor geopolitik dan risiko ketergantungan. Jika dilihat secara keseluruhan, variasi sumber bantuan ini justru memberi keuntungan bagi Vietnam untuk punya ruang lebih besar dalam melakukan diversifikasi dan tidak bergantung pada satu pihak saja. Hal ini secara tidak langsung memperkuat posisi tawar Vietnam dalam bernegosiasi dengan para donor internasional.

C. Analisis Komparatif

Bagian akan menguraikan analisis komparatif antara kedua negara dalam mengelola bantuan internasional dan utang luar negeri. Perbedaan fundamental dari kedua negara ini tidak terletak pada volume dana yang diterima melainkan pada arsitektur politik domestik, kapasitas institusional, serta strategi geopolitik dalam menavigasi tata kelola global, sebagai berikut penjelasannya:

1. *Perbandingan Tingkat Ketergantungan dan Kemandirian Ekonomi*

Hubungan antara ketergantungan bantuan internasional dan kemandirian ekonomi di Filipina dan Vietnam terlihat sangat kontradiksi atau berlawanan. Filipina masuk dalam Jebakan utang sejak berakhirnya rezim Ferdinand Marcos. Ketika rezim tersebut selesai, Filipina mewarisi utang luar negeri sekitar 26 miliar USD untuk memenuhi kewajiban membayar utang luar negeri, pemerintah harus mengalokasikan sekitar 20–45% anggaran tahunan selama hampir dua dekade hanya untuk pembayaran utang. Kondisi ini jelas membatasi ruang fiskal negara., anggaran yang seharusnya bisa digunakan untuk sektor produktif atau layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan jadi tertekan. Dalam jangka panjang, situasi ini ikut berkontribusi pada stagnasi ekonomi dan memperkuat ketergantungan terhadap pembiayaan eksternal.

Namun, transisi Vietnam menuju kemandirian menunjukkan pola yang berbeda. Vietnam memulai reformasi ekonomi dalam kondisi krisis, tapi pendekatannya terhadap bantuan lebih strategis. Dana dari *Official Development Assistance* (ODA) digunakan sebagai instrumen sementara bukan sebagai sumber utama yang terus diandalkan. Hal ini terlihat dari penurunan rasio ODA terhadap anggaran nasional, dari sekitar 25,4% pada tahun 2003 menjadi 11,2% pada tahun 2013. Penurunan ini bukan berarti bantuan berkurang begitu saja, tapi menunjukkan bahwa kapasitas fiskal domestik Vietnam semakin kuat.

Perbandingan ini menunjukkan Filipina cenderung masuk dalam siklus ketergantungan yang berdampak pada melemahnya otonomi fiskal, sementara Vietnam justru lebih mampu memanfaatkan bantuan sebagai “*batu loncatan*” menuju kemandirian ekonomi.

2. Peran Institusi Negara (State Capacity) dalam Mengelola Tekanan Eksternal

Perbedaan capaian ekonomi antara Vietnam dan Filipina sangat dipengaruhi oleh kapasitas institusi negara dalam menghadapi tekanan eksternal. Vietnam menunjukkan ketangguhan institusional melalui peran negara yang cukup kuat dalam mengarahkan pembangunan ekonomi. Pemerintah Vietnam menerapkan pendekatan “*penerimaan selektif*” yaitu hanya mengadopsi kebijakan dari lembaga internasional jika dianggap sejalan dengan kepentingan nasional. Pendekatan ini membuat Vietnam tetap terbuka terhadap bantuan luar, tapi tidak sepenuhnya bergantung atau mengikuti semua rekomendasi yang diberikan. Dari sini terlihat bahwa kapasitas negara yang kuat bisa membatasi sejauh mana kebijakan asing masuk ke dalam sistem domestik.

Namun, Filipina menghadapi tantangan berupa kapasitas institusional yang relatif lebih lemah dan lebih rentan terhadap intervensi eksternal. Program *structural adjustment* dari International Monetary Fund dan World Bank telah mempersempit ruang kebijakan domestik melalui dorongan liberalisasi dan deregulasi ekonomi (Bello, 2026), seperti keterlibatan langsung lembaga United States Agency for International Development dalam berbagai program reformasi menunjukkan adanya penetrasi yang cukup dalam terhadap proses pembuatan kebijakan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa ketika kapasitas negara lemah ketergantungan terhadap aktor eksternal cenderung semakin kuat dan sulit dihindari.

3. Strategi Navigasi dalam Tata Kelola Global melalui Keterikatan Historis dan Diversifikasi

Di konteks tata kelola global, kemampuan negara untuk mendiversifikasi mitra internasional jadi faktor penting dalam mengurangi ketergantungan. Filipina misalnya, punya hubungan historis yang cukup kuat dengan Amerika Serikat serta lembaga Bretton Woods seperti International Monetary Fund dan World Bank. Kedekatan ini di satu sisi memang membuka akses ke pembiayaan global, tapi di sisi lain juga membatasi posisi tawar Filipina dalam negosiasi internasional. Ketergantungan terhadap lembaga-lembaga tersebut membuat

kebijakan ekonomi Filipina sering harus menyesuaikan dengan persyaratan donor, sehingga ruang untuk bernegosiasi jadi relatif sempit.

Vietnam sebaliknya menerapkan strategi yang lebih fleksibel lewat diversifikasi dan multilateralisasi hubungan internasional. Vietnam memanfaatkan bantuan dari Jepang untuk pembangunan infrastruktur, sambil tetap membuka diri terhadap investasi dan pinjaman dari berbagai sumber lain, termasuk Tiongkok. Pendekatan ini memberi Vietnam lebih banyak pilihan dalam menentukan kebijakan, karena tidak bergantung pada satu pihak saja. Hal itu yang membuat Vietnam bisa lebih leluasa menyesuaikan kebijakan dengan kepentingan nasional dan tetap menjaga kedaulatan ekonominya di tengah tekanan global.

4. Relevansi dengan Teori Dependensi dalam Menjelaskan Perbedaan Jalur Pembangunan

Analisis terhadap Filipina dan Vietnam pada dasarnya menguatkan apa yang dijelaskan dalam teori dependensi dalam ekonomi politik internasional. Isi kerangka ini, Filipina bisa dilihat sebagai negara *periphery* yang mengalami ketergantungan struktural terhadap negara *core*, terutama melalui mekanisme bantuan dan utang luar negeri sebagaimana dijelaskan oleh Theotonio Dos Santos dan Immanuel Wallerstein. Kebijakan liberalisasi yang dijalankan justru berdampak pada melemahnya sektor industri domestik dan semakin kuatnya dominasi kapital global. Hal ini terlihat dari bantuan internasional tidak selalu netral tetapi bisa berfungsi sebagai alat hegemoni dalam sistem ekonomi global.

Namun, Vietnam menunjukkan bahwa pola dependensi tidak selalu bersifat permanen. Meskipun pernah sangat bergantung pada bantuan dari Uni Soviet, Vietnam mampu keluar dari pola tersebut melalui reformasi ekonomi dan penguatan kapasitas negara, terutama setelah berakhirnya Perang Dingin. Bantuan internasional tetap diterima dan dimanfaatkan, tapi lebih diarahkan secara strategis sesuai kepentingan nasional. Meski begitu, potensi ketergantungan baru tetap ada, misalnya dengan meningkatnya peran Tiongkok dalam pembiayaan pembangunan yang juga membawa dimensi geopolitik. Dua kasus ini bisa dilihat bahwa dependensi bukan kondisi yang statis, melainkan sesuatu yang bisa dikelola atau bahkan dikurangi kalau negara punya strategi dan kapasitas yang memadai.

IV. KESIMPULAN

Analisis komparatif terhadap pengelolaan bantuan asing di Filipina dan Vietnam bisa disimpulkan bahwa besar kecilnya bantuan internasional bukan faktor utama yang menentukan keberhasilan pembangunan. Perbedaan hasil yang terlihat di kedua negara ini lebih dipengaruhi oleh kondisi internal masing-masing, terutama arsitektur politik domestik, kapasitas kelembagaan (*state capacity*), serta sejauh mana negara mampu menjaga otonomi dalam merumuskan kebijakan. Bisa dikatakan ini bukan soal berapa banyak bantuan yang diterima, tapi bagaimana negara tersebut mengelolanya.

Filipina dapat dilihat sebagai contoh ketika bantuan internasional tidak dikelola secara optimal. Ketergantungan yang sudah terbentuk sejak masa Ferdinand Marcos semakin diperkuat oleh intervensi lembaga keuangan global melalui program *structural adjustment*. Kebijakan seperti privatisasi dan liberalisasi yang dijadikan syarat pinjaman justru membatasi ruang kebijakan domestik. Akibatnya, sebagian besar kapasitas fiskal negara terserap untuk pembayaran utang, sementara sektor publik seperti pendidikan dan kesehatan kurang mendapatkan perhatian. Jika terus menerus kondisi ini bisa menyebabkan pada stagnasi ekonomi dan membuat Filipina kehilangan fleksibilitas dalam merancang kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan domestik.

Berbanding terbalik dengan Vietnam yang menunjukkan pendekatan yang lebih terarah dalam memanfaatkan bantuan internasional, melalui reformasi ekonomi *Đổi Mới*, pemerintah Vietnam tetap membuka diri terhadap ekonomi global, tapi tidak sepenuhnya menyerahkan kendali kepada pihak eksternal. Bantuan seperti *Official Development Assistance* (ODA) dimanfaatkan secara selektif, terutama untuk pembangunan infrastruktur yang mendukung produktivitas. Pada saat yang bersamaan juga Vietnam secara bertahap mengurangi ketergantungan terhadap bantuan dengan memperkuat kapasitas fiskal domestik. Bantuan luar negeri bisa menjadi alat untuk mempercepat pembangunan, selama dikelola dengan strategi yang jelas dan tetap berpijak pada kepentingan nasional.

REFERENSI

- Bank, A. D. (2021). *Asian Development Outlook*. ADB.
- Bank, W. (2022). *World development report 2022*. World Bank Publications.
- Bello, W. (2026). *Is the structural adjustment approach really and truly dead?*
<https://www.tni.org/en/article/is-the-structural-adjustment-approach-really-and-trully-dead>
- Development, O. for E. C. and. (2020). *ODA statistics*. OECD Publishing.
- Dingwerth, K., & Pattberg, P. (2006). Global Governance as a Perspective on World Politics. *Global Governance*, 12, 185–203.
- Dos Santos, T. (1970). The structure of dependence. *American Economic Review*, 60(2), 231–236.
- Fund, I. M. (2021). *Review of conditionality*. IMF.
- Gloria, G. (2019). *How the Marcos–World Bank partnership brought PH economy to its knees*.
<https://www.rappler.com/voices/thought-leaders/227198-analysis-how-marcos-world-bank-partnership-brought-philippine-economy-to-knees/>
- Jentleson, B. W. (2017). Global Governance, the United Nations, and the Challenge of Trumping Trump. *Global Governance*, 23(2), 143–149.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic development* (12th ed.). Pearson.
- Vietnam, O. D. (2018). *Aid and development*.
<https://vietnam.opendevelopmentmekong.net/topics/aid-and-development/>
- Wallerstein, I. (2004). *World-systems analysis: An introduction*. Duke University Press.
- Woods, N. (2006). *The globalizers: The IMF, the World Bank, and their borrowers*. Cornell University Press.